



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT

JL. Raden Puguh – Praya Kompleks Kantor Bupati Gedung C Lantai 4

Praya, 30 Juni 2025

Nomor : 700.1.2.1/35/INS/Rhs/2025/Eva
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

di –

Praya

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi AKIP; (b) menilai tingkat implementasi AKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi AKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja, walaupun belum optimal.
- b. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal secara berjenjang dan dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja, walaupun belum optimal.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memperoleh nilai 70,12 atau predikat “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah “sangat baik” jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun	Nilai Tahun
		2024	2025
a. Perencanaan Kinerja	30	20,32	23,84
b. Pengukuran Kinerja	30	19,86	20,52
c. Pelaporan Kinerja	15	8,13	9,09
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,67	16,67
Nilai Hasil Evaluasi	100	64,97	70,12
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B (Baik)	BB (Sangat Baik)

Penerapan manajemen kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memperlihatkan peningkatan dari tahun sebelumnya dengan nilai **64,97** meningkat menjadi **70,12**, dikarenakan dari rekomendasi perbaikan telah ditindaklanjuti.

Secara umum, penerapan SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum optimal dilakukan sebagai bagian dari penerapan manajemen kinerja yang berorientasi hasil. Komponen-komponen SAKIP sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas masih terdapat beberapa yang harus dilakukan perbaikan untuk peningkatan penerapan manajemen kinerja antara lain meliputi:

1) Pengukuran Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah menyusun formulasi terkait cara mengukur indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen Indikator Kinerja Utama. Selain itu, telah disusun rencana aksi sebagai dasar pengukuran kinerja, karena terdapat target yang dijabarkan secara berkala. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja telah menggunakan elektronik, namun masih berfokus kepada penyerapan anggaran belum mengarah ke pencapaian kinerja dan juga pemantauan belum dilakukan secara berjenjang sehingga realisasi pencapaian kinerja belum terkendali dengan baik.
- Belum mengungkap seluruh informasi capaian kinerja pada aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja. Misalkan: Belum menginformasikan faktor pendorong keberhasilan kinerja, faktor penghambat pencapaian kinerja, tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya, dan tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya.

2) Pelaporan Kinerja

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Laporan kinerja belum disusun secara berkala.
- Laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja)
- Laporan kinerja diharapkan mampu menghasilkan umpan balik yang dapat digunakan sebagai perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya.

3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal diantaranya sebagai berikut:

- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilakukan secara berjenjang, sehingga strategi selanjutnya guna efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja tidak sesuai dengan yang diharapkan.
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilakukan secara formal, terdokumentasi dan dilakukan secara terus menerus serta evaluasi internal yang dilakukan dapat memberikan rekomendasi perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi guna perbaikan akuntabilitas kinerja yang signifikan kedepannya.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dalam meningkatkan penerapan SAKIP, kami mengharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menindaklanjuti rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengungkapkan seluruh informasi capaian kinerja pada aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja (*e-Monev*), antara lain dengan menginformasikan faktor pendorong keberhasilan kinerja, faktor penghambat pencapaian kinerja, tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya, dan tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya.
2. Laporan kinerja disusun secara berkala per triwulan
3. Menyempurnakan laporan kinerja agar dapat mengungkapkan dan menginformasikan seluruh informasi dan analisis tentang pencapaian kinerja, serta menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan secara mendalam, sehingga laporan kinerja dapat digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
4. Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja internal dengan upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria
5. Meningkatkan Implementasi SAKIP dengan memberikan kesan yang nyata (*dampak*) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.
6. Memastikan bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilakukan secara formal, terdokumentasi dan dilakukan secara terus menerus serta evaluasi internal yang dilakukan dapat memberikan rekomendasi perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi guna perbaikan akuntabilitas kinerja yang signifikan kedepannya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar KepalaBadan Penanggulangan Bencana Daerahmemberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.


Inspektur
Kabupaten Lombok Tengah,
Drs. H. LAUD AKNAL AFANDI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681231 198903 1 065